

Menelisis Konsep Pendidikan Jerman dan Australia sebagai Benchmarking Pendidikan di Indonesia

Suyadi¹

STAI An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

suyadisurabaya@gmail.com

Abstrak

Banyak faktor yang mempengaruhi pendidikan, tentu saja sangat dimungkinkan jika terjadi perbedaan kualitas baik antar institusi bahkan anatar negara. Perbedaan inilah yang memicu peneliti untuk melakukan penelitian sekaligus mengkomparasi perbedaan-perbedaan yang ada melalui beberapa faktor yang mempengaruhinya. Metode yang dilakukan adalah studi kepustakaan dari berbagai sumber, baik yang bersifat online maupun offline. Tujuan akhir dari komparasi ini adalah untuk menganalisis peluang sistem pendidikan yang ada di dua negara tersebut bisa diadopsi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jerman dan Australia dikenal sebagai negara yang adaptif dalam perbedaan pemikiran terutama penerapan kebijakan pendidikannya. Peneliti sengaja memilih negara Jerman dan Australia sebagai pembanding karena kedua negara tersebut memiliki sistem pendidikan yang layak untuk dikembangkan di Indonesia.

Kata Kunci: Kualitas, Penelitian, Adaptif

¹ Suyadi STAI An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

Pendahuluan

Kemajuan pola pikir suatu bangsa dapat diukur melalui seberapa kuat negara yang bersangkutan memandang *urgensi* pendidikan sebagai tolak ukur kemajuan sistem pendidikan suatu negara, tentu saja dikaitkan dengan keunikan dan tata nilai dari masing-masing negara yang bersangkutan²

Secara umum dapat dikatakan bahwa perbedaan hasil yang diperoleh, dipengaruhi oleh perbedaan budaya, sosial serta ekonomi masyarakat di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali faktor politiknya. Faktor-faktor itulah yang menjadi daya pikat para peneliti untuk melakukan studi dalam rangka memenuhi tingginya aspirasi masyarakat terhadap program pendidikan. Hasrat untuk melakukan studi komparasi dari berbagai bidang penelitian ditengarahi menjadi ciri khas kemajuan pendidikan di masa yang akan datang.

Studi komparasi dimulai dari dunia barat yang tentu saja sangat berbeda dengan kondisi saat ini, pemicunya adalah adanya “pertarungan” dengan pihak gereja yang sangat dominan saat itu. Inisiasi dilakukan untuk membongkar dominasi dan otorisasi gereja dalam mengatur dan menentukan arah/kebijakan pendidikan yang telah

terjadi berabad-abad lamanya tanpa ada kemajuan secara signifikan.

Perubahan secara besar-besaran atas penentuan kebijakan pendidikan terjadi ketika banyak negara yang memerdekakan diri dan berpindah keyakinan dari kristen Katolik menjadi kristen Protestan sekaligus sarana untuk mereformasi dominasi gereja yang mencengkeram kehidupan dunia pendidikan saat itu. Jerman adalah salah satu negara yang mengawali proses perubahan kebijakan sistem pendidikan Nasionalnya dan hasil yang dicapai sangat memuaskan sehingga diikuti oleh negara-negara lainnya semisal Australia, dll³ Kesuksesan Jerman dalam mereformasi sistem pendidikan nasionalnya telah menginspirasi banyak negara untuk melakukan perubahan yang sama yaitu meninggalkan otorisasi/dominasi gereja dalam mengatur sistem dan arah kebijakan pendidikan.

Pengembangan sistem pendidikan yang digagas oleh para penggiat pendidikan tidak lepas dari peran teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga mereka memiliki kebebasan untuk mengaktualisasi diri dan terbebas dari sudut pandang sempit dalam memahami pendidikan. Hasilnya, bahwa pendidikan tidak bisa hanya dilihat dari

² Agustiar Syahnur, *Comparison of the 15 Countries Education System*, (Bandung, 2001)

³ Don Adams, *Educational Pattern In Contemporary Societe, In Tbut (Eds)* Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2005)

satu sudut atau dimensi apalagi hanya fokus pada satu pemikiran saja sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para pendahulu, tetapi telah muncul kesadaran bahwa pendidikan adalah salah satu subyek yang harus dikembangkan melalui berbagai dimensi pemikiran.

Saat ini, *benchmarking*, menjadi salah satu pilihan alternatif pengembangan sistem pendidikan untuk menghindari resiko stagnasi yang disebabkan oleh egosentris pengelola pendidikan. Kuatnya resistensi yang ada seringkali menjadi penghambat kemajuan dan perkembangan pendidikan suatu negara. Studi komparasi telah membuka mata hati seseorang untuk tidak menjadi “katak dalam tempurung” yang merasa cukup baik tanpa pernah tahu bahwa di sekelilingnya telah terjadi perubahan yang sangat signifikan.

Penulis berupaya untuk melakukan analisis terhadap konsep pendidikan di Jerman dan Australia untuk melihat seberapa besar peluang yang bisa dimanfaatkan untuk dikembangkan dalam sistem pendidikan Indonesia, tentu saja disesuaikan dengan beberapa faktor dan kondisi yang ada di Indonesia.⁴

⁴ John Francis Cramer dan George Stephenson Browne *Contemporary Education*, (New York, Harcourt Brace, 1956)

Keunggulan sistem pendidikan di Jerman dan Australia dipilih karena layak untuk diadopsi di Indonesia. Sistem pendidikan Jerman sukses meraih tujuannya, “hanya” sekitar 25 tahun setelah menelan kekalahan dalam Perang Dunia II.

Lompatan sejarah telah mereka torehkan terutama di bidang kedokteran, sastra dan teknologi, bahkan keunggulan mereka di bidang seni mampu menghilangkan traumatik masyarakatnya akibat kekejian peperangan di masa lalu.

Politik & Sistem Pendidikan di Jerman

Kehancuran akibat kekalahan dalam perang dunia yang dialaminya selama dua kali berturut-turut telah menyadarkan sebagian besar masyarakatnya untuk mengubah paradigma dalam membangun sistem pendidikannya, supaya terhindar dari kesalahan yang sama dengan cara memisahkannya dari kekuatan politik dan tidak menyerahkannya hanya pada satu kekuatan lembaga atau perorangan. Dominasi kekuatan Hitler yang tidak terbendung telah menjerumuskan Jerman ke jurang kehancuran terutama sistem pendidikan Nasionalnya.⁵ Fokus perubahan diarahkan pada penguatan rasa percaya diri sebagai negara yang

⁵ Robert F. Lawson, *In Comparative Education Review*

maju dan berdaulat. Kondisi internal negara yang menjadikan mereka menjadi dua negara yang “terpisahkan” menjadi pemicu terjadinya isu persatuan terutama dalam budaya dan pendidikan yang lebih mandiri dan saling menguatkan.

Keberhasilan Jerman dalam mengembangkan sistem pendidikannya dimulai sejak abad ke 17 dan ditandai dengan diserahkannya kewajiban mengatur pendidikan kepada Negara sebagai penanggung jawab utama, yang pada mulanya menjadi perebutan antara negara, gereja bahkan negara bagian, masing-masing menganggap memiliki otorisasi untuk mengembangkan dan mengatur secara mandiri.⁶

Penunjukan negara menjadi otorisasi pengembangan pendidikan, melahirkan suatu peraturan yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk memilih dan menentukan sekolah yang diinginkan, jenis pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Secara umum, kewenangan pendidikan menjadi tanggung jawab negara bagian dan federasi, porsi negara bagian terletak pada pengembangan TK pendidikan umum dan sekolah kejuruan

Struktur Pendidikan

Urutan pendidikan di Jerman dimulai dari umur 3 s.d 6 tahun yang disebut dengan *Kindergarten* (Taman Kanak-Kanak), fase ini disebut dengan *Vorschulische Einrichtungen*, artinya masa persiapan sebelum sekolah yang sesungguhnya. Kesuksesan Jerman dalam mengelola pendidikan di tingkat awal ini, menjadi rujukan banyak negara, bahkan sebagai bentuk penghormatan, para pengadopsi tetap menggunakan nama asli dari sekolah tersebut.⁷

Tahapan berikutnya adalah *Grundschule*, yaitu pendidikan dasar yang dimulai umur 7 s.d 10 tahun, di Indonesia biasa disebut dengan SD (Sekolah Dasar), setelah melalui tahapan ini, para siswa diberi kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya melalui 4 pilihan jenis sekolah, yaitu : *Hauptschule*, *Realschule*, *Gesamtschule*, *Gymnasium*⁸

Sebelum mengikuti 4 jenis sekolah di atas, para siswa harus mengikuti masa orientasi untuk mengetahui bakat dan minat sekaligus sebagai bahan dasar pemetaan kemampuan dari masing-masing siswa. *Hauptschule* dan *Realschule* diutamakan bagi para siswa yang ingin langsung bekerja setelah menyelesaikan sekolahnya. Tentu saja setelah melalui

⁶ Agustiner Syahnur, *Perbandingan Sistem Pendidikan*

⁷ J.T Fery, *System of Education of Federal Republik of Germany*, (New York: Pergamon Press, 1985)

⁸ Frackman, *Higher Education Policy in Germany* (Paris: Pergamon Press, 1993)

pendidikan di *Berufsfachschule* / *Fachoberschule*.

Adapun *Gymnasium* diperuntukkan para siswa yang berkeinginan untuk studi lanjut ke jenjang berikutnya (universitas) melalui jalur lain, disamping itu ada jalan lain, yaitu melalui praktek kerja beberapa tahun tertentu bagi mereka yang tidak terburu-buru memasuki dunia perkuliahan.

Kesetaraan gelar yang diperoleh di Jerman dan Indonesia hanya pada nama tetapi beda pada tingkatannya, kualifikasi diploma di Jerman setara dengan Master (S2) bahkan bisa langsung mengikuti program doktoral (Ph.D), tentu saja gelar tersebut tidak berlaku di sistem pendidikan Indonesia. Ijazah Sarjana di Indonesia diakui sederajat *Vordiplom* di Jerman, namun juga bisa berbeda sesuai dari *Anerkennung der Studienleistungen*

Ada tiga tahapan yang bisa dilalui oleh pelajar Indonesia yang bergelar S1 jika ingin melanjutkan studinya di Jerman, pertama melalui jalur *Studienleistungen* Kedua melalui jalur *Studienleistungen* ketiga melalui jalur *Studienleistungen*. Kemudahan bagi pelajar S1 Indonesia yang ingin segera langsung mendapat promosi (S3) di Jerman bisa dilakukan jika ada kesesuaian antara bidang studi yang diminati dengan objek

yang akan diteliti setelah melewati tahapan *Anerkennung*⁹

Di Jerman ada dua model pendidikan, yaitu *Fachhochschule (FH)* dan *Universität* Perbedaannya adalah, FH lebih menekankan pada bidang aplikasi, jadi lebih banyak praktek daripada teori, mirip seperti poltek yang ada di Indonesia, konsekwensinya, belajar di jalur FH tidak bisa tembus hingga gelar doktor, karena diorientasikan bagi para mahasiswa yang ingin segera terjun ke dunia industri secara langsung. Jalur lain yang bisa ditempuh adalah *Musikhochschule* (bagi mereka yang berminat menggeluti bidang musik), *Pedagogische Hochschule* (dunia pendidikan & keguruan) dan *Kunsthochschule* (bagi mereka yang tertarik di bidang seni).

Konsep Perguruan Tinggi di Jerman sangat berbeda dengan di Indonesia terutama terkait dengan sistem waktu perkuliahan, baik waktu kuliah yang diajarkan per semesternya maupun urutan dan jenis mata kuliahnya, sistem tersebut, secara tidak langsung mengajarkan kemandirian kepada masing-masing mahasiswa untuk mengatur, menentukan dan mengelola sendiri kapan dan jenis mata kuliah yang akan dipelajari, termasuk menentukan

⁹ U. Teichler and B. Kehm, *System of higher Education of Federal Republik of Germany* (Oxford: Pergamon Press,

sendiri kapan waktu seminar dan ujian yang akan dilaksanakannya.

Plus minus konsep di atas berpulang pada masing-masing mahasiswa, ada yang merasa mendapat manfaat atas kebebasan waktu yang ditentukan, namun tidak sedikit mahasiswa Indonesia yang “terjerumus” karena keasyikan melakukan pekerjaan sampingan lainnya dan terlena atas “kelonggaran” waktu yang telah ditentukan.

Kemandirian dan kemampuan dalam mengelola waktu menjadi *total priority* bagi setiap mahasiswa jika tidak ingin gagal dalam menempuh studinya di Jerman, tidak jarang perkuliahan dilakukan dalam suatu auditorium besar yang diikuti oleh banyak mahasiswa (sekitar 500 s.d 600 mahasiswa) tentu saja kondisi ini menuntut lebih banyak konsentrasi, apalagi perkuliahan yang disajikan lebih banyak menggunakan bahasa Jerman, tetapi di beberapa kampus ada juga yang menjadikan bahasa Inggris sebagai pengantar perkuliahan. Ada tiga macam perkuliahan, pertama perkuliahan *Vorlesung*, kedua Fokus Grup Discission (*seminar*) ketiga latihan & ujian (*Ubung*)

Biasanya ujian dipandu oleh sang professor baik ujian tulis maupun lisan, bentuk assesmennya juga berbeda-beda antara satu professor dengan professor

lainnya, ada yang bersifat remedial dalam waktu yang berdekatan tapi tidak jarang harus mengulang di tahun berikutnya.

Dua pilihan pendidikan yang banyak disukai para mahasiswa adalah *Fachhochschule* dan Universitas tentu saja disesuaikan dengan kemampuan masing-masing mahasiswa, bagi yang ingin berkarir di bidang industri atau ingin segera bekerja, maka FH adalah pilihannya, tapi bagi yang ingin menekuni dunia riset dan pengembangan di bidang akademik, maka universitas adalah pilihan yang tepat.

Semestinya konsep di atas bisa diadopsi dan dikembangkan di Indonesia, tentu saja dengan mengubah beberapa regulasi dan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya, sebab pada dasarnya antara Jerman dan Indonesia memiliki peluang dan potensi yang sama. Bagi mahasiswa yang menghendaki *freedom* dipersilahkan masuk melalui jalur Univeritas, tapi bagi mahasiswa yang menghendaki “arahan” silahkan masuk melalui jalur *Fachhochschule* supaya bisa segera memasuki dunia usaha. Saat ini, ada beberapa *Fachhochschule* yang juga menawarkan “*International Master*” menggunakan program berbahasa Inggris dalam perkuliahannya.

Education Management Of Germany

Kebijakan penting yang dilakukan oleh pemerintah Jerman adalah memberikan otorisasi penuh kepada negara bagian untuk mengatur dan mengelola kebijakan dan sistem pendidikan yang ada untuk dikembangkan demi kemajuan Pendidikan Nasional, kewenangan tersebut di atas diatur melalui kesepakatan lembaga legislatif di tingkat negara bagian.

Pada awalnya, masing-masing negara bagian memiliki konsep yang berbeda, terutama dalam menentukan batas dan masa waktu pendidikannya, kondisi inilah yang mendorong munculnya standarisasi yang diberlakukan secara nasional dan mengalihkan sebagian kebijakan dan kewenangan negara bagian kepada federasi¹⁰ Terkait alokasi penganggaran dana pendidikan, pemerintah Jerman telah memutuskan untuk membaginya menjadi bagian belanja negara bagian untuk biaya personal dan partisipasi dari masyarakat untuk keperluan infrastruktur.

Adapun pemerintah federal bertanggung jawab di bidang perluasan dan pengembangan institusi baik sarana, proses pendidikan maupun hal-hal lain yang terkait riset dan penelitian, itu berarti bahwa institusi pendidikan di

Jerman bersifat gratis (tidak memungut biaya pendidikan kepada para mahasiswanya), kecuali biaya hidup yang harus disiapkan oleh masing-masing mahasiswa, biasanya untuk transportasi, konsumsi dan akomodasi selama menempuh pendidikan di Jerman. Biasanya mahasiswa hanya perlu membayar uang yang disebut “*Sozialgebühren*”.¹¹ Yaitu fasilitas pembayaran dengan harga di bawah standar ala mahasiswa

Education Evaluation

Pemerintah Jerman lebih menekankan penugasan dalam bentuk penelitian untuk mengukur hasil evaluasi belajar daripada mengadakan Ujian Nasional dalam bentuk soal pilihan ganda secara sistemik sebagaimana yang diberlakukan di Indonesia.

Kalaupun ada, dikhususkan untuk beberapa kasus tertentu, misalnya keperluan menganalisis “*dyslexia*” (kesulitan belajar karena kondisi tertentu pada otak), itupun bukan dimaksudkan melakukan penilaian hanya untuk keperluan diagnosa dan identifikasi saja.

Untuk mengetahui kemajuan hasil belajar siswa, pemerintah Jerman memberikan kewenangan mutlak kepada para tenaga pengajar untuk melakukan penilaian pada masing-masing siswa

¹⁰ Agustiar Syhanur, *Perbandingan Sistem Pendidikan*

¹¹ W.B. Elley, *how in the World do Student Read*, IEA Study of Reading Literacy

selama proses pembelajaran berlangsung dan hasilnya dilaporkan dalam bentuk laporan tertulis terutama untuk sekolah tingkat dasar. Bobot penilaian tertinggi diberikan kepada para siswa yang memiliki partisipasi aktif selama proses pembelajaran berlangsung, ditambah lagi dengan penugasan di luar kelas.

Objektivitas penilaian guru terhadap hasil belajar masing-masing siswa menjadi suatu keniscayaan, dikarenakan adanya variasi prosedur penilaian serta jenis tugas yang diberikan, bahkan di beberapa negara bagian, diperlukan kode tertentu untuk memastikan bahwa hasil belajar yang dilaporkan sesuai dengan kemampuan siswa yang sesungguhnya.

Sertifikat tamat belajar dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat di tingkat negara bagian setelah menyelesaikan pendidikan di *Hauptschule* dan *Realschule* guna memantau standar minimal hasil proses belajar, prosedurnya bisa berbeda antar negara bagian, adapun tugas untuk memenuhi hasil ujian akhir di *Gymnasium* menjadi kewenangan pejabat setempat.

Philosophical Basis and Education System Policy

Ada tiga bidang filsafat yang mempengaruhi penyusunan kurikulum pendidikan suatu negara, kesemuanya merupakan gambaran filosofi

masyarakatnya¹², pertama *ontology* yang berkaitan dengan hakekat dan realitas, kedua *epistemology* yang berkaitan dengan hakikat ilmu pengetahuan, ketiga *axiology* yang berkaitan dengan tata nilai kehidupan.

Konsep pendidikan yang diusung Jerman pada awal mula kekuasaan Hitler adalah *Fascist Rationalization* guna mencetak manusia unggul di segala bidang (mampu menguasai berbagai bidang pengetahuan), baik keilmuan, olahraga maupun seni. Bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur serta kekalahan telak Jerman dalam perang dunia II telah menyadarkan mereka untuk mengubah filosofi pendidikannya dengan tidak lagi menjadikan persatuan *Einheit* dan pembagian kekuasaan tidak hanya bertumpu pada satu orang *die Macht verteilen*, sebagai modal kebangkitan atas kehancuran negara dan mental masyarakatnya.

Ideologi Nazi yang telah mereka yakini waktu itu, ternyata tidak mampu memberdayakan Jerman, oleh karena itu mereka segera beralih kepada filsafat *Eksistensialisme* yang menitikberatkan pada kemampuan diri sendiri, filsafat *progresivisme* dan filsafat *critical pedagogy* untuk menilai suatu kebenaran, ketiga

¹² Chaedar Alwasilah, *Filsafat bahasa dan Pendidikan*, (Bandung : Rosda Karya, 2008)

filsafat di atas sangat mempengaruhi perjalanan konsep Pendidikan Jerman.

Munculnya beragam konsep filosofi pendidikan yang ada di Jerman disebabkan karena negara tersebut menganut sistem federasi yang memberikan kekuasaan kepada masing-masing negara bagian untuk menentukan sendiri sistem dan filosofi pendidikannya, sehingga lama masa pendidikan di masing-masing negara juga sangat dimungkinkan berbeda. Pada akhirnya perubahan landasan filsafat pendidikan inilah yang menjadi acuan baik oleh pemerintahan negara bagian maupun pemerintahan federasi terutama di bidang pendidikan.

Berikut ini adalah beberapa kebijakan khas sistem pendidikan Jerman, *Pertama*, pendidikan merupakan modal utama suatu negara untuk membangun suatu peradaban dari keterpurukan ekonomi maupun ideologi untuk itu pemerintah Jerman memastikan bahwa setiap warga negara berhak dan memiliki akses yang sama atas pendidikan yang layak untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah Jerman membebaskan biaya pendidikannya mulai *Kindergarten* sampai Perguruan Tinggi. *Kedua*, kewenangan mutlak dalam mengelola sistem pendidikan tidak hanya bertumpu pada salah satu pemerintahan saja (monopoli), akan tetapi berbagi peran dan tugas

antara pemerintahan negara bagian maupun federasi (*sharing oriented*). *Ketiga*, melibatkan peran aktif masyarakat, *ke empat*, penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur telah membuka mata hati mereka bahwa ada ketimpangan yang cukup besar di berbagai bidang terutama di wilayah Jerman Timur, untuk itu pemerintah melakukan gerak cepat untuk menyeimbangkannya dengan cara memberikan alokasi anggaran secara proporsional. Pemerataan kualitas pendidikan di setiap wilayah merupakan kebijakan yang dinilai akurat untuk menghilangkan retensi dan potensi masalah di masa yang akan datang. *Ke lima*, menentukan kualifikasi keahlian tenaga pengajar (Guru), bahwa menjadi guru di Jerman bukan sekedar pekerjaan sampingan, sebab relevansi keahlian dalam mengajar bidang studi menjadi perhatian serius pemerintah, karena itu proses seleksi menjadi guru di Jerman sama sulitnya seperti menjadi dokter, konsekwensinya, pemerintah menjamin kesejahteraan guru terutama di bidang finansialnya, oleh karena itu tidak terbayangkan ada guru yang “nyambi” melakukan pekerjaan lain, sebagaimana yang terjadi pada sebagian guru di Indonesia.a.¹³

Kajian Filosofi Jerman vs Indonesia

¹³ Cecep Wahyu Hoerudin, *Makalah Studi Penelitian manca Negara Jerman dan Indonesia*, Universitas Pendidikan Bandung, 2009

Secara filosofi, konsep sistem pendidikan yang dibangun antara Jerman dan Indonesia memiliki kemiripan, terutama di bidang sejarah, keduanya memiliki masa lalu yang hampir sama, Jerman berusaha bangkit setelah mengalami kekalahan dalam PD-II sedangkan Indonesia berusaha bangkit setelah mengalami masa penjajahan yang cukup lama, sehingga keduanya memiliki keinginan yang sama untuk “keluar” dari keterpurukan dan menjadi negara yang berdaulat¹⁴

Disamping persamaan, tentu saja ada perbedaannya terutama konsep sentralisasi dan desentralisasi pendidikan, di Jerman sudah tuntas baik di tingkat negara bagian maupun federasi, sementara di Indonesia, masih menjadi bahan diskusi dan perdebatan karena masih belum menemukan kata sepakat baik masyarakat maupun pemerintah

Sistem Perguruan Tinggi di Jerman menerapkan “kebebasan” dalam mengatur masa studi dan jenis mata kuliah yang diminati, untuk mendorong kemandirian dalam belajar, sementara di Indonesia, hal tersebut belum bisa diwujudkan, sebab masa studi dan jenis mata kuliah yang diajarkan sudah ditentukan.

Sudah seharusnya Indonesia belajar banyak dari Jerman, mulai dari konsep pemerataan pendidikan, pengelolaan anggaran, penanganan kualitas guru dan yang paling penting adalah menumbuhkan kesadaran kepada para pemangku kebijakan bahwa betapa pentingnya merencanakan dan mengatur pendidikan ke arah yang lebih baik.

Kabar baiknya, telah muncul kesadaran untuk mengejar ketertinggalan menuju Indonesia yang lebih baik, hal ini ditandai dengan penambahan anggaran dana pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan hingga pelosok negeri, pembebasan biaya pendidikan hingga jenjang sekolah lanjutan, sertifikasi guru dan dosen yang kesemuanya itu menjadi “*starting point*” menuju Indonesia lebih maju.

Sistem & Tujuan Pendidikan di Australia

Standarisasi pendidikan di Australia telah mendapat pengakuan secara internasional, terlebih sumbangsuhnya dalam membebaskan masyarakatnya untuk melek huruf hingga 99%. Konsep pendidikannya dibangun untuk mengembangkan ketrampilan dan rasa percaya diri para siswanya, karenanya tidak heran jika para lulusannya unggul

¹⁴ Chaedar Al wasilah, Filsafat Bahasa, Bandung Rosda Karya, 2008

di berbagai bidang terutama bidang penelitian, inovasi dan teknik.¹⁵

Pengakuan tingkat internasional juga diberikan kepada Australia atas keberhasilannya dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bahasa Inggris bagi pelajar manca negara baik yang diselenggarakan di Australia maupun di luar negeri, tidak kurang dari 400 ribu pelajar dari 200 negara telah menikmati manfaat dari program tersebut.¹⁶

Tujuan umum pendidikan di Australia disusun berdasarkan “kompromi” dari berbagai komponen, mulai negara bagian, lembaga-lembaga pendidikan yang ditunjuk pemerintah, hingga pihak akademisi dll yang diorientasikan pada pengembangan pelayanan baik kebutuhan individu maupun masyarakat. Di level sekolah, penekanannya pada pengembangan potensi siswa, sedangkan level pendidikan tinggi, diarahkan untuk pemenuhan di bidang ekonomi dan kebutuhan masyarakat pada umumnya.¹⁷

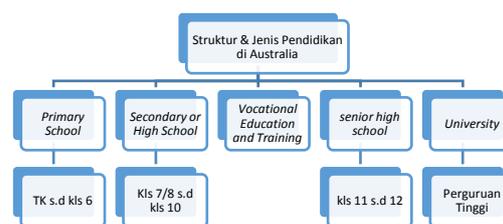
Masing-masing perguruan tinggi di Australia berbagi peran dalam mengembangkan program yang ada, pihak universitas lebih mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan,

sedangkan sektor pendidikan teknik dan pendidikan lanjutan lainnya lebih menekankan perhatian pada pendidikan kejuruan.

Secara teknis pemerintah federal tidak terlibat langsung dalam pengelolaan pendidikan kecuali sebatas tujuan umum yang disahkan dalam peraturan dan perundang-undangan, namun demikian bertanggung jawab penuh atas ketersediaan dana pendidikan dan kelangsungan proses pendidikannya.

Structure and Type of Education in Australia

Australia telah menentukan 5 jenjang pendidikan yang dimulai dari *Primary School*, setingkat TK s.d SD kelas 6, *Secondary or High School*, setingkat kelas 7/8 s.d 10, *Senior High School*, setingkat kelas 11 s.d 12, selanjutnya *University*, yaitu perguruan tinggi, pilihan berikutnya adalah *Vocational Education and Training*, untuk memudahkan, bisa dilihat bagan dibawah ini



Gambar 1
Struktur & jenis Pendidikan di Australia.¹⁸

¹⁵ L Ingvarson and Chadbourne, *Valuing Teacher Work nen Driection in Teacher Appraisal* (Melbourne, CER)

¹⁶ D. Cruz J. and P. Langford, *Issues in Australian Education* (Melbourne longman Chesire)

¹⁷

<http://www.scribd.com/doc/8583903/Sistem-Pendidikan-Australia>, hlm. 4

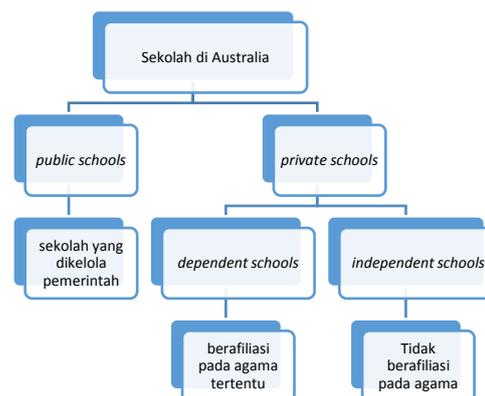
¹⁸Education Attace; Embassy of Republic of Indonesia-Canberra, *Sistem Pendidikan Australia*,

Pendidikan di Australia dimulai sejak anak berusia 4.5 th s.d 5,5 tahun hingga usia 15 atau 16 tahun, disesuaikan dengan kebijakan di masing-masing negara bagian, orang tua diwajibkan ikut serta dalam pengawasan pendidikan putra-putrinya jika tidak ingin dikenakan sanksi atau denda. Pada tingkat *senior secondary school* masing-masing siswa diperkenankan untuk memilih hampir semua mata pelajaran yang diinginkannya, sedangkan level berikutnya *high school* masing-masing siswa diberikan kebebasan untuk memilih semua mata pelajaran yang diminati termasuk bidang kejuruan “*hospitality, tourism, woodworking, metal working*”. Setifikat kelulusan di akhir kelas 12 (*Year 12 certificate*) diberikan kepada siswa yang dilengkapi dengan transkrip dari masing-masing nilai pelajaran yang didapat melalui nilai tugas dan nilai hasil ujian dari masing-masing negara bagian dan diberikan di akhir tahun di kelas 12.

Selanjutnya nilai tersebut biasanya digunakan untuk masuk ke Perguruan Tinggi tanpa tes lagi. Ada dua macam sekolah di Australia, pertama *public schools* yaitu sekolah yang dikelola oleh pemerintah baik kurikulum maupun operasional pembiayaannya dan *private schools* sekolah yang dikelola pihak swasta, umumnya dilakukan pihak gereja

atau institusi keagamaan lain termasuk Islam.

Secara umum sekolah-sekolah swasta di Australia memiliki kebebasan dalam menentukan kurikulum yang digunakan, walaupun sebagian besar juga mengacu pada ketentuan yang telah diputuskan oleh pemerintah sebagaimana yang telah diterapkan oleh sekolah-sekolah negeri.



Gambar 2
Model Sekolah di Australia

Manajemen Pendidikan

Konstitusi Australia memberikan amanah kepada negara bagian untuk bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan mulai dari pra sekolah hingga pendidikan menengah yang dikomandani oleh seorang menteri pendidikan. Langkah kongkrit berikutnya, departemen pendidikan melakukan *open recruitment* guru dan karyawan, menyediakan anggaran yang dibutuhkan serta menyiapkan sarana & prasarana khususnya bagi sekolah-sekolah pemerintah

Pada sektor pendidikan dasar dan TAFE *Technical and Further Education* terutama menyediakan berbagai macam program studi pendidikan tinggi kejuruan, sebagian besar program kualifikasi di bawah National Training System, Australian Qualifications Framework dan juga *Australian Quality Training Framework* terdapat perbedaan tugas antara negara bagian yang satu dengan negara bagian lainnya, di sebagian negara bagian, tugas di atas menjadi tanggung jawab utama, sementara di sebagian negara bagian lainnya hanya sebatas koordinator penyelenggara. Konsep dasarnya adalah pengadministrasian yang terpisah dari pendidikan dasar, oleh karena itu, di sebagian negara bagian dibentuk koordinator yang bertugas memberikan masukan kepada menteri Pendidikan terutama yang berkaitan dengan regulasi dan skala prioritas di bidang pendidikan.

Beberapa tahun berikutnya, Commonwealth juga melakukan distribusi pendanaan pendidikan khusus melalui Komisi Sekolah Commonwealth (*Commonwealth Schools Commission*, disingkat CSC) dan melalui Komisi Pendidikan Tinggi Commonwealth (*Commonwealth Tertiary Education Commission*), disingkat CTEC.¹⁹

Secara politik, pejabat kementerian di tingkat Commonwealth bertanggung jawab kepada Parlemen Commonwealth setelah mendapat masukan dari para menteri pendidikan di tingkat negara bagian berdasarkan kewenangan *the Australian Education Council* (AEC). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atau beberapa kebijakan pendidikan di Australia.

Tidak kalah dengan sekolah yang berlabel pemerintah, sekolah swasta di Australia juga yang sangat berperan aktif dalam memajukan pendidikan warganya, tidak kurang 34% dari jumlah penduduk Australia bersekolah di sekolah swasta dan angka tersebut terus meningkat semenjak tahun 2000 an, perkembangan tersebut tidak terlepas dari dominasi dewan gereja terutama katolik Roma yang menampung hampir 80% siswa, secara administrasi pemerintah tidak ikut campur dalam pengelolaan sekolah-sekolah swasta di Australia.

Pendanaan di perguruan tinggi ataupun CAE (salah satu lembaga otonom yang didirikan berdasarkan undang-undang) ditanggung langsung oleh Commonwealth dan dikelola melalui CTEC (*Commonwealth Tertiary Education Council*) melalui badan koordinasi yang dibentuk di masing-masing negara bagian melalui

¹⁹ Agustiar Syahnur, *Perbandingan Sistem Pendidikan...*hlm. 61

perencanaan dan pengkajian yang dikonsultasikan dengan CTEC.

Kurikulum dan Metodologi Pengajaran

Sejak tahun 2000 an, pemerintah Australia telah mendelegasikan kewenangan penyusunan kurikulum kepada masing-masing sekolah, dengan hasil yang berbeda antara sekolah yang satu dengan lainnya, karena itu ada beberapa negara bagian yang melakukan sentralisasi namun masih tetap memberikan kewenangan pada masing-masing sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntunan lokal, dan pada sebagian negara bagian lainnya para penanggung jawab pendidikan hanya menyusun kerangka besar dan diserahkan kepada masing-masing sekolah untuk dijabarkan sesuai kebutuhan terutama pada tingkatan *the Australian Capital Territory (ACT)* dan *the Northern Territory*, khusus untuk sekolah menengah, terutama kelas akhir, kurikulum diatur dan ditentukan secara sentralistik untuk kepentingan ujian eksternal

Komisi kurikulum dalam departemen pendidikan bertanggung jawab untuk menyusun kurikulum di masing-masing bidang yang nantinya akan dipakai oleh sekolah pemerintah maupun sekolah-sekolah swasta berdasarkan teritori masing-masing.

Pemerintah Commonwealth juga membentuk tim Pusat Pengembang Kurikulum (*Curriculum Development Centre, / CDC*) yang bertugas melakukan koordinasi dan deseminasi sekaligus menyiapkan kurikulum dan buku ajar, dibantu oleh seksi kurikulum, departemen pendidikan, Dewan Penelitian Pendidikan Australia (ACER), itu berarti bahwa pengembangan kurikulum di Australia melibatkan semua pihak yang berkepentingan berdasarkan "*Curriculum Framework*".²⁰ dan *links across the curriculum*²¹

Tabel 1. Kerangka Kerja Kurikulum Australia

Kerangka Kerja Kurikulum Australia	
Latar Belakang	1. Keragaman Budaya 2. Perubahan Struktur Keluarga 3. Laju Perubahan Teknologi Yang Cepat 4. Masalah Lingkungan Global, 5. Perubahan Sifat Kondisi Sosial, 6. Perubahan Di Tempat Kerja, 7. Saling Ketergantungan Dalam Ekonomi Global, 7. Standar Hidup Yang Tidak Pasti
Karakteristik	1. Mengejar Pengetahuan Dan Komitmen Untuk Mencapai Potensi, 2. Penerimaan Diri

²⁰ Australian Bureau of Statistic, *Schools, Australia 1993*, (Camberra: ABS, 1993), hal. 8

²¹ D' Cruz J and P. Langford (Eds.), *Issues in Australian...*, hlm. 88

	Dan Rasa Hormat Terhadap Diri Sendiri,
	3. Rasa Hormat Dan Kepedulian Terhadap Orang Lain Dan Hak-Hak Mereka,
	4. Tanggung Jawab Sosial Dan Kewarganegaraan,
	5. Tanggung Jawab Lingkungan

<i>understand, interpret, justify and make patterns;</i>	memahami, menafsirkan, membenarkan dan membuat pola
<i>Students visualize consequences, think laterally, recognize opportunities and potential and are ready to test choices;</i>	Siswa memvisualisasikan konsekuensi, berpikir lateral, mengenali peluang dan potensi dan siap untuk menguji pilihan
<i>Students understand and appreciate the physical, biological, and technological world and have the knowledge and skills and values to make related decisions;</i>	Siswa memahami dan menghargai dunia fisik, biologis, dan teknologi serta memiliki pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai untuk membuat keputusan terkait
<i>Students understand their cultural, geographical and historical context and have the knowledge, skills and values needed for active participation in life in Australia;</i>	Siswa memahami konteks budaya, geografis dan sejarah mereka dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk partisipasi aktif dalam kehidupan di Australia
<i>Students interact with other people and cultures other than themselves and are equipped to contribute to the global community;</i>	Siswa berinteraksi dengan orang dan budaya lain selain diri mereka sendiri dan dilengkapi untuk berkontribusi pada komunitas global
<i>Students participate in their own creative activities and understand and engage with other people's art, culture and intellectuals;</i>	Siswa berpartisipasi dalam kegiatan kreatif mereka sendiri dan memahami serta terlibat dengan seni, budaya, dan intelektual orang lain
<i>Students value and apply practices that encourage personal growth and well-</i>	Siswa menghargai dan menerapkan praktik yang mendorong pertumbuhan dan

Tabel 2. Links Across The Curriculum

<i>Students use language to understand, develop and communicate ideas and information and to interact with others;</i>	Siswa menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan mengomunikasikan ide dan informasi dan untuk berinteraksi dengan orang lain
<i>Students choose, integrate and apply numerical and spatial concepts and techniques;</i>	Siswa memilih, mengintegrasikan dan menerapkan konsep dan teknik numerik dan spasial
<i>Students recognize when and what information is needed, find and obtain it from various sources and evaluate, use, and share it with others;</i>	Siswa mengenali kapan dan informasi apa yang dibutuhkan, menemukan dan memperolehnya dari berbagai sumber dan mengevaluasi, menggunakan, dan membagikannya kepada orang lain;
<i>Students choose, use, and adapt technology;</i>	Siswa memilih, menggunakan, dan mengadaptasi teknologi
<i>Students describe and reason about patterns, structures and relationships to</i>	Siswa menjelaskan dan alasan tentang pola, struktur dan hubungan untuk

<i>being;</i>	kesejahteraan pribadi
<i>Students are self-motivated and confident in their approach to learning and able to work individually and collaboratively;</i>	Siswa memotivasi diri dan percaya diri dalam pendekatan mereka untuk belajar dan mampu bekerja secara individu dan kolaboratif
<i>Students recognize that everyone has the right to feel valued and safe, and, in this case, understand their rights and obligations to be responsible for behaving</i>	Siswa mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk merasa dihargai dan aman, dan, dalam hal ini, memahami hak dan kewajiban mereka untuk bertanggung jawab atas perilaku

Konsep Evaluasi

Australia menerapkan konsep *extensive external evaluation* selama bertahun-tahun dalam menentukan kualifikasi dan pemberian sertifikat kepada para siswa, belakangan kebijakan tersebut diubah dan diganti dengan kenaikan kelas atas dasar umur pada level *primary and secondary school*. Secara umum sekolah bertanggung jawab mengadakan ujian di masing-masing level kecuali

Hampir pada semua level, sekolah punya tanggung jawab melakukan ujian di setiap level /tahun, sekaligus pemberian sertifikat yang diterimakan pada akhir tahun pendidikan ke-10 berdasarkan penilaian internal kecuali pada *final level of secondary school* karena menggunakan *extensive external evaluation*, maka sertifikat akan diberikan pada tahun ke 12. Bagi sekolah yang sudah

terakreditasi (ACT dan negara bagian Queensland), berhak mengadakan ujian internal sebagai pengganti *external evaluation* dan berhak memberikan sertifikat kepada siswa kelas akhir tentu saja disertai dengan kriteria tertentu sebagai syarat masuk ke perguruan tinggi. Adapun untuk bisa masuk ke TAFE (*Technical and Further Education*) dimungkinkan setelah menamat kan pendidikan selama 10 tahun dengan syarat hasilnya harus memuaskan atau bisa jadi lulus secara otomatis berdasarkan usia.

Perbedaan Sistem Pendidikan Australia & Indonesia

Indonesia dan Australia adalah dua negara yang sama-2 menerapkan wajar (wajib belajar), bedanya hanya pada waktu yang dibutuhkan, Australia membutuhkan waktu sekitar 10 tahun, sedangkan di Indonesia hanya 9 tahun, ke depan akan ditingkatkan menjadi 12 tahun.

Lama masa studi di Australia untuk level pendidikan dasar dan menengah berbeda di masing-masing negara bagian, berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, sedangkan di Indonesia, lama studinya sama, mulai di tingkat kota/kabupaten hingga propinsi.

Indikator kesamaan model pendidikan di Australia dan Indonesia bisa dilihat dari banyaknya mahasiswa

Indonesia yang belajar di beberapa universitas di Australia, bahkan ada beberapa paket bantuan yang diberikan oleh pemerintah Australia demi kemajuan pendidikan di Indonesia dan secara geografis sebenarnya Indonesia dan Australia bertetangga.

Pengaruh Konsep Pendidikan

Jerman dan Australia

Konsep penjenjangan yang dilakukan baik Jerman, Australia maupun Indonesia memiliki banyak kesamaan, bedanya, mereka melakukannya secara desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada masing-masing negara bagian, sedangkan di Indonesia dilakukan secara *sentralistik* (terpusat), walaupun tetap mempertimbangkan peranan daerah, hanya saja kebijakan pemerintah tetap lebih dominan melalui menteri pendidikan dan kebudayaan, hal ini mirip seperti yang dilakukan di Jerman dengan memberikan kewenangan kepada menteri Pendidikan dan berkoordinasi dengan menteri di negara bagian.

Perbedaan lainnya terkait pendanaan pendidikan, di Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan didukung oleh pemerintah daerah, sedangkan di Jerman ditanggung oleh pemerintah dan partisipasi masyarakat, adapun di Australia, kewenangan pendanaan

diserahkan pada masing-masing menteri negara bagian.

Otorisasi di bidang pendanaan juga berakibat pada kebijakan penyusunan kurikulumnya, di Indonesia disusun dan dirancang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya mengikuti arah kebijakan yang sudah ditentukan, sedangkan Jerman dan Australia, memberi kesempatan kepada pihak sekolah dan negara bagian untuk ikut serta tentu saja berkompromi dengan pemerintahan pusat.

Adapun tentang evaluasi pembelajaran, di Indonesia lebih terencana dan terukur jika dibandingkan dengan Jerman dan Australia yang hanya mengandalkan penilaian eksternal.

Berdasarkan perbandingan sistem pendidikan dari kedua negara tersebut di atas, Jerman dan Australia memiliki banyak kemiripan dengan Indonesia, bahkan Indonesia mempunyai Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 2 dan 4 dan UU No. 20 tahun 2003 yang mengatur tentang pendidikan gratis sebagaimana yang juga dilakukan oleh Jerman dan Australia, hanya saja beda dalam pelaksanaan dan realisasinya.

Pelajaran penting dari sistem pendidikan di Jerman dan Australia adalah, keterlaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan yang

merata, alokasi anggaran yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan yang paling penting adalah kemudian akses pendidikan bagi semua masyarakat, bandingkan dengan Indonesia yang masih belum sepenuhnya mampu memberikan kemudahan dan pemerataan akses pendidikan, terutama di daerah pedalaman terpencil, termasuk pengaturan alokasi anggaran pendidikan yang terkadang tidak tepat sasaran.

Tingginya animo masyarakat Indonesia untuk melanjutkan studi ke Jerman atau Australia dikarenakan beberapa, diantaranya adalah : 1. Memiliki kompetensi di bidang teknologi dan ekonomi; 2. Memiliki kualitas research , dan 3. Gratis dikarenakan sistem *social democrat* yang menjamin semua warganya memperoleh jaminan pendidikan dan penghidupan yang layak.

Starting point yang bisa dilakukan adalah melakukan *comparasi* atas kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di negara lain, sambil melakukan pembenahan *step by step* atas beberapa kekurangan yang kita miliki.

Simpulan

Salah satu langkah positif yang bisa dilakukan Indonesia adalah melakukan studi komparasi terhadap negara-negara maju terutama terkait sistem dan pola pendidikan warganya mulai tingkat dasar hingga perguruan tingginya. Sistem dan

pola pendidikan yang dikembangkan Jerman dan Australia dan keberhasilannya yang telah diakui dunia, selayaknya menjadi pemicu bagi Indonesia melakukan *benchmark* untuk dikembangkan di Indonesia, tentu saja disesuaikan dengan beberapa kondisi dan situasi yang ada.

Masing-masing warga negara memiliki hak yang sama untuk menikmati pendidikan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh undang-undang merupakan “pintu masuk” pengembangan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia sebagaimana yang telah dilakukan oleh dua negara sebelumnya , Jerman dan Australia. Langkah kongkrit yang bisa dilakukan pemerintah adalah penetapan alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya, salah satu penyebab keberhasilan sistem pendidikan Jerman dan Australia adalah kemampuan kedua negara tersebut dalam mengalokasikan anggaran pendidikannya sesuai dengan sasaran yang dimaksud.

Daftar Pustaka

- Agustiar Syahnur, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara, Bandung: Lubuk Agung, 2001
- Artikel "Tujuan pemerataan pendidikan Indonesia 'moderat', laporan UNESCO menunjukkan". The Jakarta Post edisi Sabtu 12 Juni 2008
- A. Margrith Lin-Huber, Kulturspezifischer Spracherwerb, Bern: Verlag Hans Huber, 1998
- Biro Statistik Australian, Schools; Australia 1993, Camberra: ABS,
- Chaedar Alwasilah, Filsafat Bahasa dan Pendidikan, Bandung: Rosda Karya, 2008
- Cecep Wahyu Hoerudin, dkk, Makalah Studi Pendidikan Negara Jerman dan Indonesia, Universitas Pendidikan Bandung, 2009
- Don Adams, Pola Pendidikan Dalam Masyarakat Kontemporer, di. Thut (Eds.), Polapola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- D 'Cruz J dan P. Langford (Eds.), Masalah dalam Pendidikan Australia, (Melbourne: Longman Cheshire,
- Frackman, dkk, Kebijakan Pendidikan Tinggi di Jerman: Dalam Goedegebuure, Leo et al (Eds), Kebijakan Pendidikan Tinggi: Perspektif Komparatif Internasional, Paris: Pergamon Press,
- H. Mohle, Republik Demokratik Jerman: Sistem Pendidikan, B. R. Clarke dan Neave, (Eds), The Encyclopedia of Higher Education, Vol. 1, Oxford: Pergamon Press,
- John Francis Cramer dan George Stephenson Browne, Pendidikan Kontemporer, New York: Harcourt Brace, 1956
- J. T. Fey, Sistem Pendidikan Republik Federal Jerman. F. Husen dan Postlethwaite (Eds), Ensiklopedia Pendidikan Internasional. New York:Pergamon Press,
- L. Ingvarson dan Chadbourne, (Eds.), Menilai Pekerjaan Guru: Arahan Baru dalam Appraisal Guru, Melbourne: ACER,
- Robert F. Lawson, Pendidikan Rekonstruksi: Sekolah dan Universitas Jerman Timur setelah Unifikasi oleh Rosalin M. O Princhard, (Resensi Buku), Dalam Tinjauan Pendidikan Komparatif, Vol. 44 No. 1, Februari, 2000
- U. Teichler dan B. Kehm, Sistem Pendidikan Tinggi Republik Federal Jerman Clarke, B. R., dan Neave, G. (Eds), The Encyclopedia of Higher Education, Vol. 1 (Oxford: Pergamon Press
- W.B Elley, Studi IEA Membaca Literasi, Den Haag: Asosiasi Internasional untuk Evaluasi Pencapaian Pendidikan